

## **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Way Kanan Lampung**

*Full Paper*

**Dian Mustika, S.E.**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Yogyakarta

[Mustikadian2@gmail.com](mailto:Mustikadian2@gmail.com)

**Sri Hastuti, S.E., M.Si., Ak., CA**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Yogyakarta

[Sri\\_has\\_tuti@yahoo.com](mailto:Sri_has_tuti@yahoo.com)

**Sucahyo Heriningsih, S.E., M.Si., Ak., CA**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

[Sheriningsih@gmail.com](mailto:Sheriningsih@gmail.com)

**Abstract:** *Fraud is a lie deliberate, an untruth in reporting assets or manipulation financial data for profit parties to the manipulation. The type of fraud which often happens in government sector is corruption. This study is aimed to explore the perceptions of employees in government agencies about factors that impact fraud such as information asymmetry, rule enforcement, the effectiveness of internal control, unethical behavior, and suitability of compensation.*

*Population of this research is using government employees of Way Kanan District who working at financial sub-department. Method of sampling is using purposive sampling. Total sampling 45 employees who have met the criteria as respondent to this research. This research uses the questionnaires to collect the data. Data analysis in this research using multiple linear regression analysis.*

*The findings of the research showed that there is a negative effect between rule enforcement and a positive effect between unethical behavior to fraud. But the research showed that there is no effect between information asymmetry, the effectiveness of internal control to fraud, and suitability of compensation.*

**Keywords:** *Fraud, rule enforcement, the effectiveness of internal control, unethical behavior*

## 1. PENDAHULUAN

Kecurangan atau *fraud* adalah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut (Alison, 2006).

Jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio–Corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum dominan dilakukan di daerah. Sepanjang 2014, tersangka korupsi terbanyak adalah pejabat atau pegawai pemda/kementerian. Khusus semester II 2014, urutan terbanyak tersangka korupsi adalah pelaksana proyek (PP), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Sementara pada semester I 2014, urutan terbanyak kedua adalah direktur, komisaris, konsultan, dan pegawai swasta. Dua kelompok ini sama-sama garda depan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Indonesia Corruption Watch, 2014).

Selama tahun 2015 ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beserta jajaran di tingkat kejaksaan negeri (kejadi) menyelidiki 41 kasus korupsi dan telah mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 5.432.227.717 dengan rincian sebagai berikut: Kejati Lampung Rp 1.987.791.136, Kejari Bandar Lampung Rp 708.386.557, Kejari Kalianda Rp 666.870.776, Kejari Metro Rp 180.000.000, Kejari Kotabumi Rp 626.906.539, Kejari Liwa Rp 50.000.000, Kejari Menggala Rp 119.434.910, Kejari Sukadana Rp 150.000.000, Kejari Gunung Sugih Rp 710.962.529, Kejari Blambangan Umpu Rp 275.256.470, Cabjari Pringsewu Rp 30.000.000, dan Cabjari Talang Padang Rp 106.618.800 (Lampung Online, 2015).

Kabupaten Way Kanan di Lampung termasuk daerah dengan jumlah uang pengembalian hasil korupsi yang cukup besar yaitu sebesar Rp 275.256.470 dan juga memiliki kasus penyimpangan yang cukup banyak serta melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Contoh kasus yang terjadi pada Kabupaten Way Kanan adalah kasus penyimpangan proyek pembangunan jalan kampung Argomulyo-Jukuhbatu yang melibatkan mantan kepala subbagian anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Way Kanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 141,7 juta, kasus dana operasional raskin yang melibatkan camat Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 122,8 juta, dan kasus korupsi rehabilitasi Gedung *Islamic*

Center Kabupaten Way Kanan yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) yang bertanggung jawab sebagai PPK dalam proyek tersebut sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 271 juta.

Dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010), mengatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan (*pressure*) adalah faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologi pelaku (Ramamooti, 2008). Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus di selesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecurangan. Kesesuaian kompensasi dibutuhkan agar individu dapat merasa tercukupi dan diharapkan dapat mengurangi adanya keinginan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Thoyibatun (2009) menemukan sistem kompensasi yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk tekanan diasumsikan dengan kesesuaian kompensasi.

*Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dari tiga faktor resiko kecurangan (tekanan, kesempatan, dan pembenaran) peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi dari tingkat paling atas. Sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang baik dan efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan. Hasil penelitian Wilopo (2006) dan Najahningrum (2013) menemukan keefektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi/instansi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Agar kegiatan dalam suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dibuatlah peraturan organisasi. Peraturan tersebut harus dipatuhi oleh semua pegawai, apabila terjadi pelanggaran biasanya pelaku akan diberi hukuman atau sanksi agar di masa mendatang pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Jika dalam organisasi penegakan peraturan atas pelanggaran dinilai baik maka perilaku menyimpang seperti kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi dapat diminimalkan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013).

Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah (pemerintah daerah/eksekutif) sebagai penyedia informasi/*agent* dengan pihak pemberi amanah (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) sebagai pengguna informasi/*Principal* (Scott, 2009). Jika terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan

kecurangan. Hasil penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa tingginya asimetri informasi yang terjadi dapat menyebabkan kecurangan. Oleh karena, itu variabel yang digunakan untuk *opportunity* dalam penelitian ini adalah keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, dan asimetri informasi.

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Kecurangan dalam akuntansi merupakan tindakan ilegal yang berkaitan dengan perilaku tidak etis (Hernandez dan Groot, 2007). Hasil penelitian Wilopo (2006) menemukan bahwa semakin tinggi level perilaku etis individu akan semakin cenderung tidak berbuat kecurangan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk *rationalization* (rasionalisasi) adalah perilaku tidak etis.

Pada penelitian ini peneliti ingin menganalisis kembali dengan menggunakan variabel yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, dan alat analisis yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Peneliti ingin menguji pengaruh variabel asimetri informasi, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan Dinas Kabupaten Way Kanan di Lampung.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Persepsi**

Secara Etismologi, persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang berarti penglihatan, tanggapan, daya memahami, atau menanggapi. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005), persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau mengintepretasikan peristiwa, obyek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh pelaku persepsi, target yang dipersepsikan, dan situasi (Robbins, 2003). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dibagi dua yaitu faktor eksternal dan factor internal. Faktor eksternal atau dari luar yakni *concretness*, yaitu gagasan yang abstrak yang sulit dibandingkan dengan yang objektif, *novelty* atau hal baru, biasanya lebih menarik untuk dipersepsikan daripada hal-hal lama, *velocity* atau percepatan, misalnya pemikiran atau gerakan yang lebih cepat dalam menstimulasi munculnya persepsi lebih efektif dibanding yang lambat, *conditioned stimuli* yakni stimulus yang dikondisikan. Sedangkan faktor-faktor internal adalah motivasi yaitu dorongan untuk merespon sesuatu, *interest* dimana hal-hal yang menarik lebih diperhatikan daripada yang tidak menarik, *need* adalah kebutuhan akan hal-hal tertentu dan terkait *asumptions* yakni persepsi seseorang dipengaruhi dari pengalaman melihat, merasakan, dan lain-lain (Sukanto, 2007).

## **Teori Atribusi**

Teori atribusi merupakan penjelasan dari cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Robbins, 2003). Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tergantung pada tiga faktor, yaitu kekhususan (ketersendirian), konsensus, dan konsistensi. Menurut Heider (1958) dalam Sarwono (2010), teori atribusi ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal.

## **Kecurangan (*Fraud*)**

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada semua bagian dalam suatu organisasi, mulai dari jajaran tertinggi sampai dengan jajaran terendah dapat melakukan tindak kecurangan. Menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Tuanakotta (2010), *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut Hall (2007), kecurangan (*fraud*) adalah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. *Fraud* juga dapat diartikan sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindaklanjuti oleh korban dan kerusakan korban.

## **Asimetri Informasi**

Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pemegang amanah (pemerintah daerah/eksekutif) sebagai penyedia informasi/*agent* dengan pihak pemberi amanah (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) sebagai pengguna informasi/*Principal* (Scott, 2009). Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), asimetri informasi yaitu *principal* (masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif) memberikan wewenang kepada agen (pemerintah daerah/eksekutif) untuk mengatur instansi yang dijabatnya. Pendelegasian wewenang akan menyebabkan pemerintah daerah sebagai pengelola instansi akan lebih mengetahui prospek dan informasi instansi sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dengan pihak legislatif yang disebut asimetri informasi. Bila terjadi asimetri informasi, pemerintah daerah akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan, dan lain-lain (Khang, 2002). Menurut Scott (2009) terdapat dua macam asimetri informasi yaitu *Adverse selection* dan *Moral*

*hazard*. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain demi kepentingan pribadi.

### **Penegakan Peraturan**

Penegakan peraturan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian peraturan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan peraturan (Rahardjo, 2009). Menurut Soekanto (2006) penegakan peraturan adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup. Semua peraturan yang berlaku umum maupun khusus meliputi tiga unsur, yaitu perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang, akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau yang melanggar peraturan, cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai peraturan tersebut (Arikunto, 1990).

Menurut Raharjo (2009), peraturan sebagai suatu sistem terdiri dari tiga sub sistem, yaitu:

1. Sub sistem nilai atau substansi yang merupakan sistem nilai atau norma baik berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) atau dalam bentuk tidak tertulis (kebiasaan).
2. Sub sistem *legal actor* atau sub sistem *legal structure*, dapat berupa lembaga lembaga atau berupa aparat hukum yang bertugas dan berperan dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum dan sifat-sifatnya yang abstrak menjadi hukum yang bersifat konkret.
3. Sub sistem *legal culture* (budaya hukum), yaitu berupa perasaan hukum, opini hukum, pendapat hukum, atau kesadaran hukum dan masyarakat, yang memberikan pengaruh terhadap keberlakuan substansi hukum maupun terhadap aparat hukum.

### **Keefektifan Pengendalian Internal**

Keefektifan pengendalian intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu (Baridwan, 2009). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia/IAI (2001), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Keefektifan pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ini. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

## **Perilaku Tidak Etis**

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 2006). Menurut Arens dan Loebbecke (1997) dalam Arifyani (2012) terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yaitu: (1) Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda membuat perilaku tidak etis merupakan hal sulit untuk dimengerti. (2) Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan.

## **Kesesuaian Kompensasi**

Menurut Hariandja (2005), kesesuaian kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang di bayar oleh perusahaan. Kompensasi yang diterima karyawan harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan kepada organisasi. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Gibson, et al. 1997). Menurut Berger (2008) dalam Faizal (2013) mendefinisikan kompensasi berdasarkan klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai (*cash compensation*), kompensasi kotor (*gross compensation*), dan kompensasi bersih (*net compensation*). Kompensasi tunai adalah imbalan dalam bentuk gaji, bonus tunai, dan insentif jangka pendek. Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **a. *Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana pihak dalam atau pengelola perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak pemakai informasi selain pengelola. Karena pihak Dinas Pemerintah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, sehingga akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan. Pertanggungjawaban SKPD kepada masyarakat disajikan dalam bentuk laporan realisasi APBD. Jika masyarakat tidak mengetahui

transaksi ekonomi apa saja yang mempengaruhi laporan tersebut secara detail, kemungkinan penyaji laporan akan memanipulasi laporan tersebut dengan tujuan kepentingan pribadi, misalnya agar kinerjanya terlihat baik (Najahningrum et al., 2013).

Penelitian yang dilakukan Najahningrum et al. (2013) dan Chandra et al. (2015) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan demikian, semakin tinggi asimetri yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, kecenderungan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>1</sub>.** *Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).*

**b. Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)**

Semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut. Apabila penegakan peraturan kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan pelanggaran peraturan yang bisa saja mengarah pada perilaku menyimpang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tegas, penegakan peraturan dalam suatu instansi, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi juga akan semakin rendah.

Penelitian Najahningrum et al. (2013) dan Chandra et al. (2015) menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan penegakan peraturan yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub>.** *Penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).*

**c. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)**

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010). Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, jika pengendalian internal yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan efektif maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi dari kecurangan termasuk apabila ada karyawan yang berniat melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi (Davia et al., 2000).

Penelitian Najahningrum et al. (2013) dan Chandra et al. (2015) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, dengan sistem pengendalian internal yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:



**H<sub>3</sub>.** *Keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).*

**d. *Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Menurut Kohlberg (1969), moral berkembang melalui tiga tahap, yaitu: pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Tahap post-konvensional merupakan akhir dari tahapan perkembangan moral yang membentuk prinsip etika yang dimiliki manajemen. Prinsip tersebut menunjukkan sikap dari manajemen dalam mengelola perusahaan. Prinsip tersebut mewakili sikap manajemen dalam mengelola suatu perusahaan atau instansi. Jika perilaku yang ditunjukkan manajemen cenderung tidak etis maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi.

Hasil penelitian Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dari birokrasi/manajemen akan memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis birokrasi, semakin tinggi tingkat kecurangan akuntansi pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>4</sub>.** *Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).*

**e. *Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi karyawan tentang sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. Jika para karyawan tidak puas atas kompensasi yang diterimanya maka akan berdampak terhadap organisasi. Artinya jika ketidakpuasan tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka setiap karyawan menyatakan keinginan untuk memperoleh kompensasi yang sesuai. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Gibson et al., 1997),

Hasil penelitian Faizal (2013) dan Chandra et al. (2015) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka semakin rendah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

**H<sub>5</sub>.** *Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (fraud).*

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Instrumen yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi tentang persepsi pegawai mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*). Kuesioner tersebut disebar langsung kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada subbagian keuangan Dinas Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

### **3.2. *Populasi dan Sampel***

Populasi dari penelitian adalah semua pihak yang berwenang dan tanggung jawab untuk terlibat dalam penggunaan dana yang dianggarkan, pelaksana akuntansi, dan orang yang bertugas berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban di Dinas Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan pegawai subbagian keuangan Dinas Kabupaten Way Kanan di Lampung dengan kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada Dinas yang bersangkutan.
2. Tidak sedang dipindahkan ke kabupaten lain atau tidak sedang dimutasi dari bagian keuangan ke bagian lain dari 1 bulan terakhir.

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 orang, Jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 45 orang. Kuesioner yang disebarkan ke responden sebanyak 45 (100%). Dari 45 kuesioner yang disebarkan tersebut, kuesioner yang kembali sebanyak 41 kuesioner (91%).

### **3.3. *Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode angket dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur sesuai dengan judul penelitian. Setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala likert dari 1 sampai dengan 5. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya.

### **3.4. *Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel***

#### **Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)**

Instrument yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan terdiri dari sembilan item pertanyaan yang dikembangkan dari jenis-jenis kecurangan menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* dalam Najahningrum et al. (2013), yang terdiri dari kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan asset, dan korupsi. Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi frekuensi kecurangan yang terjadi.

#### **Asimetri Informasi**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur asimetri informasi terdiri dari enam item pertanyaan yang dikembangkan oleh Dunk (1993) dalam Wilopo (2006). Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tinggi asimetri informasi berkaitan dengan entitas tersebut. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Situasi di mana pihak intern instansi memiliki informasi yang lebih baik atas *aktivitas* yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
- b. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal hubungan *input-output* dalam bagian yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
- c. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui potensi kinerja yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
- d. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengenal teknis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
- e. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengetahui pengaruh faktor eksternal dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.
- f. Situasi di mana pihak intern instansi lebih mengerti apa yang dapat dicapai dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dibanding pihak luar instansi.

### **Penegakan Peraturan**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur penegakan terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan dalam Najahningrum et al. (2013). Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, semakin rendah nilai yang ditunjukkan maka penegakan peraturan semakin tidak baik. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Ketaatan terhadap hukum.
- b. Prose penegakan hukum.
- c. Peraturan organisasi.
- d. Disiplin kerja.
- e. Tanggung jawab.

### **Keefektifan Pengendalian Internal**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur keefektifan pengendalian internal terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan dari PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Najahningrum (2013). Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, semakin rendah nilai yang ditunjukkan maka pengendalian internal semakin tidak efektif. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian.
- b. Penilaian risiko.
- c. Kegiatan pengendalian.
- d. Informasi dan komunikasi.
- e. Pemantauan pengendalian intern.

### **Perilaku Tidak Etis**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur perilaku tidak etis terdiri dari lima item pertanyaan yang dikembangkan Tang, et al., (2003) dalam Wilopo (2006). Pengukuran variabel menggunakan

skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan maka semakin tidak etis. Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kedudukan (*abuse position*).
- b. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*).
- c. Perilaku manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*).
- d. Perilaku manajemen yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).
- e. Perilaku manajemen yang mengabaikan peraturan (*abuse rule*).

### **Kepuasan Kompensasi**

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kesesuaian kompensasi terdiri dari empat item pertanyaan yang dikembangkan Gibson et al. (1997). Pengukuran variabel menggunakan skala likert 1-5, semakin rendah nilai yang ditunjukkan maka kesesuaian kompensasi semakin tidak efektif. Variabel diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kompensasi keuangan.
- b. Pengakuan perusahaan atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan.
- c. Promosi.
- d. Penyelesaian tugas.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk melihat kelayakan data yang ada sebelum diproses menggunakan alat analisis untuk menguji hipotesis, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dan untuk melakukan uji hipotesis digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F, dan uji t.

Persamaan regresi linier yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Y:                        | Kecenderungan kecurangan          |
| $\alpha$ :                | Konstanta                         |
| $\beta_1 \dots \beta_n$ : | Koefisien arah regresi            |
| $X_1$ :                   | Asimetri informasi                |
| $X_2$ :                   | Penegakan peraturan               |
| $X_3$ :                   | Keefektifan pengendalian Internal |
| $X_4$ :                   | Perilaku tidak etis               |
| $X_5$ :                   | Kepuasan Kompensasi               |
| e:                        | Kesalahan pengganggu              |

## **4. HASIL DAN DISKUSI**

Data demografi responden dalam penelitian ini terdiri dari 22 orang perempuan dan 19 orang laki-laki, untuk masa kerja terdapat 22 orang selama 1-5 tahun, 16 orang selama 5-10 tahun, dan 3 orang selama >10 tahun. Dari segi pendidikan terakhir sebanyak 19 orang berpendidikan terakhir S1

dan 9 orang berpendidikan terakhir S2 dengan jabatan sebagai staf keuangan sebanyak 35 orang dan kepala bagian keuangan sebanyak 6 orang.

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kecenderungan jawaban yang diperoleh dari responden terhadap masing-masing variabel yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Asimetri informasi	41	2	5	2.96	1.021
Penegakan peraturan	41	2	5	4.24	.443
Keefektifan pengendalian internal	41	4	5	4.38	.377
Perilaku tidak etis	41	1	4	1.81	.460
Kesesuaian kompensasi	41	2	5	3.75	.619
Kecenderungan kecurangan	41	1	5	1.98	.620
Valid N (listwise)	41				

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2016)

Dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dengan menggunakan *confirmatory factor analysis* dan uji reliabilitas dengan menggunakan hasil koefisien *Cronbach's Alpha*. Hasil dari uji kualitas data dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Uji Kualitas Data**

Variabel	KMO-MSA	Factor Loadings	Cronbach's Alpha
Asimetri informasi (A)	0,762	0,134 – 0,932	0,902
Penegakan peraturan (P)	0,651	0,201 – 0,866	0,617
Keefektifan pengendalian internal (K)	0,706	0,057 – 0,843	0,786
Perilaku tidak etis (T)	0,589	-0,140 – 0,866	0,661
Kesesuaian kompensasi (G)	0,552	0,050 – 0,896	0,645
Kecenderungan kecurangan (F)	0,824	0,159 – 0,874	0,901

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2016)

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan hasil *confirmatory factor analysis* dari masing-masing variabel dalam penelitian memiliki nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA) > 0,50 sehingga variabel penelitian ini dinyatakan valid, namun pada butir-butir pertanyaan yang mewakili setiap variabel, terdapat butir pertanyaan yang tidak valid dikarenakan *factor loadings* < 0,40, yaitu pada butir pertanyaan A4, A5, P1, K5, T2, G1, F1, dan F9 sehingga pertanyaan tersebut harus dibuang, untuk selanjutnya, pengujian hanya menggunakan pertanyaan yang memiliki *factor loadings* > 0,40. Dari hasil uji reliabilitas, diperoleh hasil koefisien *Cronbach's Alpha* untuk enam indikator variabel > 0,60. Jadi, dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel/handal, sehingga butir-butir pertanyaan dalam variabel penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

#### 4.1. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat dilihat pada Table 3 berikut ini.

**Tabel 3**  
**Multiple Regression Analysis**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.306	5.775		1.438	.159
Asimetri Informasi	-.071	.097	-.070	-.735	.467
Penegakan Peraturan	-.447	.184	-.218	-2.435	.020
Keefektifan Pengendalian Internal	-.101	.245	-.036	-.413	.682
Perilaku Tidak Etis	1.708	.191	.825	8.957	.000
Kesesuaian Kompensasi	.250	.180	.130	1.395	.172
<i>Adjusted R Square</i>					0,753
F Hitung					25,328
Sig. F					0,000

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2016)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,306 - 0,071X_1 - 0,447X_2 - 0,101X_3 + 1,708X_4 + 0,250X_5$$

Uji hipotesis ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji F dan Uji t yang dapat dilihat pada Tabel 3. Pada pengujian tersebut didapatkan hasil *Adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,747 atau 74,4% artinya variabel asimetri informasi, penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, perilaku tidak etis, dan kesesuaian kompensasi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan (*fraud*) sedangkan sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji kelayakan model diperoleh nilai F hitung sebesar 25,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05), maka model regresi dinyatakan fit atau layak.

#### **Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*).**

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,467 (> 0,05). Dengan demikian  $H_1$  tidak didukung yang berarti asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa asimetri informasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hasil ini tidak sesuai atau berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Najahingrum et al. (2013) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan tidak didukungnya hipotesis ini membuktikan bahwa adanya asimetri informasi tidak menjamin terjadinya kecurangan (*fraud*). Dunk (1993) menyatakan bahwa terdapat perbedaan informasi (asimetri informasi) antara atasan dan bawahan yang dapat mempengaruhi bawahan dengan mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran. Dengan demikian, bawahan dapat mengungkapkan beberapa informasi pribadinya yang

mungkin dapat dimasukkan dalam anggaran. Asimetri informasi pada hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan masih menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran hanya pihak tertentu saja yang mengetahui angka yang sebenarnya serta lika-liku penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat konsisten dan sesuai dengan yang diharapkan dalam instansi tersebut.

#### ***Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Berdasarkan Tabel 3 nilai sigfikansi sebesar 0,020 ( $< 0,05$ ). Dengan demikian  $H_2$  didukung yang berarti penegakan peraturan berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Pada nilai koefisien regresi didapatkan hasil negatif yang menunjukkan bahwa  $X_2$  mempunyai hubungan berlawanan arah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan penegakan peraturan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi penegakan peraturan, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan artinya penegakan peraturan dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum et al. (2013) dan Faizal (2013) yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan peraturan dalam suatu instansi, akan membuka peluang bagi pegawai yang bekerja dalam instansi tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Amrizal (2004), praktik kecurangan akan terus berulang dalam suatu entitas jika pegawai tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam suatu entitas, peraturan dibuat agar kegiatan operasional entitas berjalan lebih efektif dan efisien. Peraturan di sini berkaitan dengan peraturan yang mengatur pegawai sebagai pihak yang terlibat langsung dengan kegiatan operasional entitas. Jika pada suatu entitas, pejabat yang berwenang tidak bertindak secara tegas, misalnya memberi sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan, maka pegawai akan melakukan pelanggaran tersebut terus menerus bahkan meningkat dari pelanggaran peraturan ringan sampai dengan pelanggaran peraturan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain seperti melakukan tindakan kecurangan. Dengan demikian penegakan peraturan harus dilakukan dalam suatu entitas agar dapat mengurangi terjadi kecurangan (*fraud*).

#### ***Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud)***

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,682 ( $> 0,05$ ). Dengan demikian  $H_3$  tidak didukung yang berarti keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Najahnigrum et al. (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*). Dengan tidak didukungnya hipotesis ini membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang efektif dan baik tidak menjamin terjadinya kecurangan (*fraud*). Mulyadi

(2011) menyatakan bahwa di dalam suatu instansi pengendalian internal dapat tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) karena dalam mengambil keputusan manajemen bisa saja kurang mempertimbangkan hal buruk yang mungkin terjadi karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur yang dijalankan kurang sesuai dengan seharusnya. Terjadinya praktik kolusi disuatu instansi dimana individu yang bertindak bersama-sama dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal.

#### ***Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud).***

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Dengan demikian  $H_4$  didukung yang berarti perilaku tidak etis berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Pada nilai koefisien regresi didapatkan hasil positif yang menunjukkan bahwa  $X_4$  mempunyai hubungan berlawanan arah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan perilaku tidak etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, semakin tinggi perilaku tidak etis, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan artinya dengan adanya perilaku tidak etis akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Faizal (2013) yang menyatakan bahwa semakin rendah perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pegawai dalam suatu instansi maka semakin rendah pula kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi. Hal ini disebabkan moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang individu. Moralitas yang buruk akan membuat individu cenderung berperilaku tidak etis. Dalam suatu organisasi atau instansi, perilaku atasan, dan lingkungan kerja merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh setiap pegawai. Menurut Dallas (2002) yang melakukan studi empiris terhadap Enron, juga menunjukkan bukti bahwa perilaku yang terfokus pada uang sebagai tujuan akhir akan mengabaikan faktor nilai dan akan berakibat menghalalkan segala cara. Dengan demikian semakin karyawan melakukan tindakan atau perilaku yang tidak etis maka akan semakin tinggi juga kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan karyawan maupun manajemen yang berada di dalamnya.

#### ***Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud).***

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sigfikansi sebesar 0,172 ( $> 0,05$ ). Dengan demikian  $H_5$  tidak didukung yang berarti kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kesesuaian kompensasi tidak dapat menekan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2007) menemukan bahwa kesesuaian kompensasi/kepuasan akan gaji tidak berpengaruh dengan persepsi aparaturnya pemerintah mengenai tindak korupsi, hal ini juga berkaitan dengan hasil penelitian ini, yang mengatakan bahwa kesesuaian kompensasi yang diterima pegawai di sektor pemerintahan tidak berpengaruh terhadap



tingkat *fraud* di sektor pemerintahan. Hal tersebut disebabkan karena tujuan utama para aparatur pemerintah bekerja adalah melayani masyarakat, meskipun mereka mengakui bahwa mereka rata-rata kurang puas dengan gajinya. Selain itu, mereka juga memahami bahwa aturan gaji pokok untuk PNS sangat dipengaruhi oleh golongan dan lama masa kerja. Mereka menyadari sepenuhnya semua kewenangan yang berkaitan dengan penentuan gaji pokok mutlak di tangan Pemerintah Pusat, seperti yang diatur PP No. 9 Tahun 2007 yang memperbaharui PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Kasus *fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan kebanyakan dilakukan oleh para pejabat atau pegawai yang memiliki gaji yang tinggi. Penyebab pegawai melakukan tindakan kecurangan adalah keserakahan (*greed*). Bologna (1993) dalam Faisal (2013) mengatakan salah satu penyebab *fraud* atau kecurangan adalah *greed* atau keserakahan, keserakahan di sini akan menuntut individu untuk memenuhi kebutuhan melebihi apa yang dibutuhkannya sendiri yang ingin hidup melebihi gaya hidup yang seharusnya, maka kenaikan kompensasi/gaji yang semakin tinggi tidak akan bisa menekan tingkat kecurangan (*fraud*).

## **5. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

### **5.1. *Simpulan***

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik simpulan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), dan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

### **5.2. *Implikasi dan Saran***

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik kecurangan dalam pemerintahan di Indonesia. Kecurangan akuntansi merupakan salah satu unsur yang utama dalam korupsi. Untuk Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung diperlukan adanya *punishment* yang tegas untuk setiap pelanggaran peraturan dan ketidaktertiban yang dilakukan semua pegawai baik atasan maupun bawahan. Diharapkan kepada pegawai untuk menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dengan seharusnya. Untuk Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Lampung dalam meningkatkan kompensasi baik dalam bentuk gaji maupun promosi ternyata tidak menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi pada pemerintahan akan tetapi perlu ditinjau ulang mengenai jumlah kompensasi yang diberikan agar dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan beberapa hal, seperti memperluas objek penelitian dan jumlah responden, serta menambahkan variabel lain yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*) seperti gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan moralitas

manajemen. Pada pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden yang akan digunakan dengan melihat tujuan dari penelitian yang akan dilakukan dan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, untuk dapat mengklasifikasi kriteria yang lebih spesifik lagi agar tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alison. 2006. *Fraud Auditing (Bagian Pertama Dari Dua Tulisan)*. <http://www.reindo.co.id>. Diunduh tanggal 16 Januari 2016.
- Amrizal. 2004. *Pengendali Teknis pada Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Deputy Bidang Investigasi*. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/kultur.pdf>. Diunduh tanggal 24 Maret 2016.
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan. (2005). *Management control system: Sistem pengendalian manajemen*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, Muhammad. 2015. *Selama 2015, Kejati Lampung Selidiki 41 Kasus Korupsi*. <http://www.lampungonline.xyz/2015/12/selama-2015-kejati-lampung-selidiki-41.html>. Diunduh tanggal 20 Februari 2016.
- Arifyani, Hesti Arlich. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal, Kepatuhan, dan Kompensasi Manajemen terhadap Perilaku Etis Karyawan Pada PT ADI SATRIA ABADI. *Jurnal Nominal 1 (1)*.
- Arikunto, Suharismi. 1990. *Peraturan dan Tata Tertib*. Jakarta: Reneika Cipta
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.
- Chandra, Devia Prapnalina dan Sukardi Ikhsan. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*) Pada Dinas Pemerintah Se-Kabupaten Grobogan. *Accounting Analyss Journal AAJ 4 (3)*.
- Dallas, Lynne L., 2002. A Preliminary Inquiry into the Responcibility of Corporations and Their Directors and Officers for Corporate Climate: The Psychology of Enron's Climate. *Working Paper*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Dunk, A.S. 1993. The Effect Budget of Emphasis and Information Asymmetri on the Relation Between Budgetary Participation and Slack. *The Accounting Review 68 (2)*.
- Faisal, Muhammad. 2013. Analisis *Fraud* di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus. *Accounting Analyss Journal AAJ 1 (3)*.
- Gibson, J.L, Ivan Cevich dan Donelly. 1997. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Griffin, Ricky W dan Ronald j Ebert. 2006. *Binis*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Hall, James. 2007. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Grasindo.
- Hernandez, J.R dan T. Groot. 2007. *Corporate Fraud: Preventive Control Which Lower Corporate Fraud*. Amsterdam Research in Accounting.

- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Terjemahan: Krista. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia Corruption Watch. 2014. *Annual Report 2014*. <http://www.antikorupsi.org/id/doc/annual-report-2014>. Diunduh Tanggal 4 Januari 2016.
- Khang, K. and Tao-Hsien Dolly King, 2002. Is Dividend Policy Related to Information Asymmetry? Evidence from Insider Trading Gains. *Working Paper*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Meliany, Lia dan Herna Ernawati. 2013. Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Journal and Proceeding Universitas Jenderal Soedirman* 3 (1).
- Mulyadi. 2011. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Najahningrum, Anik Fatun, Sukardi Ikhsan, dan Maylia Pramono Sari. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Ramamooti, S. 2008. *The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula*. *Issues in Accounting Education* 23.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh)*. Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Sarwono, Sarlito W. 2010. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Scott, William R. 2009. *Financial Accounting Theory*. Fifth Edition. Canada: Prentice Hall.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sukanto, Eman. 2007. *Perbandingan Persepsi antara Kelompok Auditor Internal, Akuntan Publik, dan Auditor Pemerintah terhadap Penugasan Audit Kecurangan (Fraud Audit) dan Profil Auditor Kecurangan (Fraud Auditor)*. Thesis. Semarang: UNDIP.
- Sulistyowati, Firma. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah tentang Tindak Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Auditor Investigatif*, Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFE UI).
- Thoyibatun, Siti. 2009. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya terhadap Kinerja Organisasi. *Ekuitas Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 16 (2): 245-260.
- Wilopo, 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX Padang.

**KUESIONER PENELITIAN**

**Bagian I: Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Suatu hal yang wajar di instansi saya, apabila untuk suatu tujuan tertentu, biaya dicatat lebih besar dari semestinya.					
2	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.					
3	Suatu yang wajar bagi instansi saya, apabila untuk tujuan tertentu harga beli peralatan/perlengkapan kantor dicatat lebih tinggi.					
4	Merupakan sesuatu yang wajar di instansi saya apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai kedalam belanja peralatan gedung kantor.					
5	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor.					
6	Bukan suatu masalah bagi instansi saya apabila perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli.					
7	Tidak menjadi suatu masalah bagi instansi saya apabila suatu transaksi memiliki bukti pendukung ganda.					
8	Suatu hal yang wajar apabila di instansi saya ditemukan adanya pengeluaran tanpa dokumen pendukung.					
9	Bukan suatu masalah bagi instansi saya, apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus.					

**Bagian II: Asimetri Informasi**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
10	Atas pekerjaan di bidang akuntansi, hanya pihak internal instansi yang mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi perusahaan yang mempunyai dampak keuangan.					
11	Hanya pihak internal instansi yang memahami seluruh hubungan antara data transaksi keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan.					
12	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan yang selesai dikerjakan.					
13	Hanya pihak internal instansi yang mengerti lika-liku pembuatan laporan keuangan.					
14	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembuatan laporan keuangan.					
15	Hanya pihak internal instansi yang mengetahui isi dan angka yang sebenarnya dari laporan keuangan yang disusun.					

**Bagian III: Penegakan Peraturan**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
16	Di instansi tempat saya bekerja, ada aturan-aturan hukum yang berlaku.					
17	Di instansi tempat saya bekerja, saya merasa para pejabat tanggap dalam penanganan pelanggaran peraturan.					
18	Di instansi tempat saya bekerja, kegiatan operasional instansi dilaksanakan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi dan pemerintah.					
19	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai datang dan pulang tepat waktu.					
20	Di instansi tempat saya bekerja, semua pegawai menjalankan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.					

**Bagian IV: Keefektifan Pengendalian Internal**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
21	Di instansi tempat saya bekerja, sudah ada pembagian wewenang dan tanggungjawab yang jelas.					
22	Di instansi tempat saya bekerja, apabila laporan keuangan perlu segera diterbitkan maka otorisasi transaksi harus dilaksanakan dan bukti pendukung harus disertakan.					
23	Di instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan peraturan untuk pemeriksaan fisik atas kekayaan instansi (kas, persediaan, dan lain-lain).					
24	Di instansi tempat saya bekerja, seluruh informasi kegiatan operasional instansi harus dicatat dalam sistem akuntansi.					
25	Di instansi tempat saya bekerja, diterapkan peraturan untuk dilakukannya pemantauan dan evaluasi atas aktivitas operasional untuk menilai pelaksanaan pengendalian internal (misalnya derajat keamanan kas, persediaan dsb).					

**Bagian V: Perilaku Tidak Etis**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
26	Di instansi tempat saya bekerja, saya pernah menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi.					
27	Di instansi tempat saya bekerja, saya pernah meminta tiket berlibur kepada rekan bisnis instansi.					
28	Di instansi tempat saya bekerja, saya diam saja bila pegawai lain bertindak sangat merugikan instansi ini.					
29	Di instansi tempat saya bekerja, saya sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.					
30	Di instansi tempat saya bekerja, saya sering terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas.					

**Bagian VI: Kesesuaian Kompensasi**

No	PERTANYAAN	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
31	Di instansi tempat saya bekerja, kompensasi keuangan yang diberikan diukur sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai instansi.					
32	Di instansi tempat saya bekerja, memberikan kompensasi/bonus lebih atas keberhasilan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik.					
33	Di instansi tempat saya bekerja, promosi/kenaikan jabatan diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai para pegawai instansi.					
34	Di instansi tempat saya bekerja, dikelola oleh manajemen yang baik sehingga para pegawai memulai dan menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik.					